Lentera dari Timur

Keboundha

keMERDEKAan 71 Tahun

SUSUNAN REDAKSI

Pemimpin Umum
Ahmad Masduki, M.Pd.

Pemimpin Redaksi
Andi Harmawan, ST.

Redaktur Pelaksana
H. Saroni, S.Pd., M.M.

Redaktur
Dr. Bambang Suharto
H. Herwin Ismawan, S.St.
Mahfud, M.Pd.
Moh. Mansur, M.Pd.
Mashudi, S.Pd.
Soetojo

Biro Hukum
Soleh, S.H.
Nanang Edi Santoso, S.H.

Staf redaksi
H. Slamet Utomo
Ir. Azhar Prasetyo
Arif Widayanto, S.E.
Dr. Hasyim Ashari
Suhariyanto, S.Pd.
Abdul Azis, S.E., S.Kom.
Jumari Suyanto, ST.
Agus Wahyu Nuryadi (Aguk)
Miftahul Janah, S.Sos.
Prof. Dr. Miftahul Aripin
Ahmad N. Jaeni,
Agus Suryawan, SP.

Sekretaris Redaksi
Moh. Bisri, S. Kom.

Art Grafis, Layout
Alkaisu Dana H. Agung Bramatiyo

Fotografer
Andi Supriyanto

Pustaka
Lies Harini, S.T.

Produksi dan Sirkulasi
Bimo Diryo

Pemasaran/Marketing
Solihin Khuzsumah
Jumrony S.
Herman
Edy S.

Keuangan
Nur harsini

Penerbit
CV. Tampo Mas Group
Jl. Halmahera 03 Tampo Cluring

Pencetak
CV. Brader Advertising
Jl. Bolodewo 37 Rogojampi

Lentera dari Timur
Keboundha

Pengantar Redaksi

Untuk kesekian kalinya kita menyampaikan kepada pembaca tentang nama dari Majalah ini agar pembaca mengerti dan paham betul tentang nama Keboundha dimana nama tersebut diilhami oleh seorang tokoh pemersatu Blambangan dalam menghadapi VOC pada waktu itu. Keboundha adalah salah satu tokoh motor penggerak berdirinya kerajaan baru yang anti VOC. Kerajaan baru di Bayu dapat dianggap sebagai bentuk proses terhadap campur tangan asing beserta semua akibatnya dengan rajanya Pangeran Pakis (I Made Sudjana, Negeri Tawon Madu, 2001, hal 70), Bayu berdiri tanggal 1 Agustus 1771. Menurut VOC Keboundha yang mengusulkan supaya desa-desa di sekeliling Bayu ditaklukkan dulu.

Keboundha meminta supaya para kepala desa memilih antara Jagapati atau kompeni, ternyata penduduk di sebelah barat dan timur menuju Bayu untuk memihaknya, sehingga Jagapati tersedia cukup banyak makanan untuk menghadapi para bupati Blambangan dan VOC, perang awal tanggal 2 Agustus 1771 pendatang baru mencapai 7.000 orang dengan pasukan bersenjata (menurut VOC).

Keboundha yang juga terkenal dengan Kebogegambol prajurit yang kebal biasa berperang (Babad Bayu ; 8-15). Keboundha mengamuk dalam berperang (Babad Bayu XXI : 1-7. Dalam tulisan Dr. Sri Margana Perebutan Hegemoni Blambangan 2012, hal 181 disebutkan : meskipun Jagapati telah gugur dalam Perang Bayu 11 Juni 1772, yang situasinya sangat memprihatinkan sebagian pemimpin Bayu memutuskan bertahan dan bertarung hingga mati, mereka terbagi menjadi empat kelompok yaitu : Bopo Larat dengan 300 orang, Bapaendo dengan 400 orang, Kyai Rupa dengan 200 orang, Malem dengan 300 orang demikianlah semangat Bayu yang anti VOC.

Kekalahan Bayu, dimana VOC menggunakan taktik perang tanpa amunisi, semua sawah ladang dari Alas Purwo sampai Banjar dan lain-lain dibakar sehingga di Bayu kelaparan dan banyak yang mati (laporan Residen Schophoff, VOC 3364; Margana, Perebutan Hegemoni Blambangan 2012; 1983). Setelah Perang Bayu selesai 11 Oktober 1772 Keboundha memimpin perang melawan VOC ke Nusa Barung di selatan Puger Lumajang.

Demikianlah Keboundha Bayu Blambangan Timur seperti Gajah Mada lahir dari keturunan siapa, gugur mana kuburnya tidak ada yang tahu. Hal itulah mengapa kita menamakan Majalah Keboundha yang selama ini tidak banyak masyarakat Banyuwangi yang tahu tentang ketokohan tersebut. Dengan telah tercetaknya majalah ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Amin

Apabila Bapak/Ibu/Saudara Ingin menulis dan dimuat di Majalah "Keboundha" silahkan hubungi redaksi Jalan Muncar 17 Srono Hp. 085330261771, 085336145972 Email : keboendho@gmail.com, keboundha@gmail.com dengan melampirkan photo, dan nomor HP Wartawan Majalah "keboundha" tidak diperkenankan meminta/menerima sumbangan dalam bentuk apa pun dari narasumber, dibekali dengan kartu pers nama tercantum di boks indeks.

Lentera dari Timur **Keboundha**

Daftar Isi

01. Cover
02. Pengantar
03. Daftar Isi
04. Kritik Pembangunan Pariwisata Berbasis Pro-Poor Tourism di Banyuwangi
05. Candi Purwo
06. Geger Blambangan V
07. Kekerasan dalam Dunia Pendidikan
11. SMPN 1 Pesanggaran
13. Esensi Kata "Merdeka" Pada HUT Kemerdekaan RI ke-71
15. Sejarah Pramuka Indonesia
17. Banyuwangi Memeroleh Adipura Buana
17. Wisata Bukit Watu Dodol
18. Upacara Ider Bumi Kemiren
18. Upacara Seblang Olehsari
19. Tradisi Puter Kayun Warga Boyolangu
19. Diaspora Banyuwangi
20. Festival Padi
21. Teori dan Konstruksi Apresiasi Sastra dalam Bahan Ajar
24. Pelatihan Kurikulum 2013 Guru SD Kabupaten Banyuwangi
25. Mengapa SMPN Kekurangan Murid ?
26. Halal Bihalal PCNU Banyuwangi
27. Strategi Penumbuhan Jiwa Entrepreneur di Perguruan Tinggi
30. Lebaran
31. Bulan Diantara Dua Hari Raya "Dzulqo'dah"
34. Pokemon Go

Segenap Redaksi Majalah Lentera dari Timur **Keboundha**

Mengucapkan "Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 Semoga Indonesia Lebih Makmur dan Sejahtera"

TYPE	JENIS	UKURAN	HARGA	TYPE	JENIS	UKURAN	HARGA
Luar Belakang	Warna	Full	2 Juta	Adv	Hitam Putih	1 Lbr	1 Juta
		1/2	1 Juta			1/2 Lbr	500 Rb
		1/4	500 Rb				
		1/8	250 Rb				
Dalam Belakang	Warna	Full	1,5 Juta	Iklan	Warna	Full	1 Juta
		1/2	750 Rb			1/2	500 Rb
		1/4	400 Rb			1/4	250 Rb

Kritik Pengembangan Pariwisata Berbasis Pro-Poor Tourism di Banyuwangi

Peran pariwisata sebagai alat pembangunan telah menjadi trend setelah tiga dekade terakhir. Di sini pariwisata terbukti berkontribusi meningkatkan kesejahteraan di tahun 1970-an. Akan tetapi, fokus ini mulai kabur dalam perdebatan setelah pembangunan tahun 1980-an dan 1990-an cenderung dominan menyejahterakan penguasa dan pengusaha besar itu-itu saja di Banyuwangi. Hal ini terlihat dari rasio gini yang masih sebesar 4,1%. Ketika yang kaya sedikit dan orang itu-itu saja, Banyuwangi lebih mudah terkena imbas krisis yang berdampak sistemik, seperti tahun 1998. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi seperti ini saja memberikan kesejahteraan yang tidak merata dan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang masih menyisakan kemiskinan di Banyuwangi.

Trend pembangunan pariwisata mengemuka lagi setelah era di atas tahun 1990-an dengan fokus pada *pro-poor tourism* (PPT). Pariwisata diorientasikan akan membawa manfaat langsung net kepada masyarakat miskin. Mulailah muncul konsep-konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism (CBT), Community Based Ecotourism Tourism (CBET), Rural Tourism, Farm Tourism, Social Capital Tourism (SCT), Locally Connected Globally Integrated Tourism (LCGIT), Local Wisdom Tourism (LWT), Agritourism, Sustainable Tourism – End Porverty (ST-EP)*, dan ***Pro Poor Tourism (PPT)*** yang semua difokuskan ke daerah-daerah desa tertinggal dan miskin. Daerah ini dominan dihuni oleh kaum nelayan dan petani yang sedang marak mengadu nasib mencari kesejahteraan ke luar daerahnya. Berbasis pada potensi atraksi di daerah miskin dan tertinggal ini, lalu dikembangkanlah infrastruktur yang mendukungnya agar mereka sejahtera di daerahnya masing-masing. Bahkan agar masyarakat miskin ikut menjadi pelaku wisata, Kementrian Pariwisata menggelontorkan pembangunan *homestay* ke daerah dengan mengikutsertakan modal masyarakat kecil. Pertimbangan meningkatkan kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengembangan pembangunan pariwisata untuk masyarakat miskin tersebut.

Namun, konsep *pro-poor tourism* yang digadang-gadang oleh masyarakat Banyuwangi dan juga menjadi perhatian pemerintah pusat tersebut, sangat kontradiktif dengan kebijakan Pemerintah Banyuwangi yang mengagetkan kalangan masyarakat ketika melakukan moratorium perizinan hotel nonbintang dan hanya mengizinkan hotel-hotel berbintang 4 dan 5, seperti Santika Aston yang akan dibangun sebentar lagi dan lain sebagainya. Sementara itu, beberapa usaha mikro jasa pariwisata dipersulit perizinannya. Beberapa usaha destinasi wisata milik masyarakat setempat pun mengalami kesulitan dalam memperpanjang usahanya hingga ada yang sampai 2 tahun baru selesai mengurus perizinan. Program perizinan satu atap yang bisa selesai cepat tidak sesuai harapan, ternyata waktunya lama, kompleks, dan berbelit-belit pengurusannya dengan berbagai katabelece dari satu kantor ke berbagai kantor yang lain penuh dengan tarikan. Pengusaha kecil masyarakat setempat jengah dengan peraturan daerah yang akhirnya hanya terkesan tarikan dan kurang mendidik pelaku pariwisata untuk lebih professional. Kondisi seperti ini juga menjadi dilemma para pengusaha kecil dan menengah di sektor pariwisata yang dominan adalah masyarakat lokal, di satu sisi mengurus perizinan susah dan di sisi lain ketika tidak mengurus perizinan terkadang banyak direcoki oleh oknum-oknum wartawan, satpol PP, dan lain sebagainya. Padahal, kondisi seperti ini juga diingatkan oleh Bapak Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika dalam pertemuan lebaran di Pendopo yang mengungkapkan bahwa jangan lelet Pemerintah Banyuwangi dengan main-main terhadap persoalan perizinan yang hingga saat ini juga masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Berdasarkan analisis tersebut, pembangunan pariwisata di Banyuwangi sudah mulai ke arah pengembangan sektor swasta dengan pendekatan ke pasar bebas berdasarkan konsep laissez-fare. Perspektif pembangunannya dinamis, modern, dan ke arah neoliberal yang menjauh dari kepentingan tumbuhnya usaha masyarakat lokal dengan adanya moratorium tersebut. Pengembangan pariwisata

(Sambungan hal : 04)

berbasis *Pro-Poor Tourism* (PPT) secara konseptual dan ideologikal serta moral pun mulai kabur.

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi ke Banyuwangi jangan disikapi gegabah dengan ephoria terlebih dahulu, bisa jadi adalah serangan balik terhadap rusaknya budaya masyarakat lokal yang ditempatkan oleh pemimpinnya sebagai penonton di daerahnya sendiri. Sejarah akan mencatat pemimpin yang kebijakannya mengkondisikan awal masyarakatnya ada pada posisi ketergantungan seperti itu. Masa depan yang suram dari masyarakat yang miskin di kemudian hari bukan berarti sepenuhnya mereka salah dan kemudian dihujat malas, bisa jadi karena pengaruh kebijakan yang salah sebelumnya seperti itu. Awalnya, masyarakat dijanjikan pekerjaan dengan dirayu menjual tanahnya dengan harga tinggi, namun setelah dijual ternyata beberapa dari masyarakat ditolak karena tidak sesuai dengan basis keahliannya dengan profesi pariwisata atau perhotelan tersebut. Sementara itu dengan berjalannya waktu uang hasil menjual tanah habis dan masyarakat pun kehilangan pekerjaannya yang sebelumnya berkebun dan berladang di tanah sendiri. Terlalu dini ketika kita berpikir masuknya investasi asing dan pendatang akan membantu masyarakat lokal dengan memberikan pekerjaan yang faktanya justru pekerjalah yang membantu pengusaha besar mengakumulasikan modalnya karena beberapa gaji pekerjanya masih di bawah Upah Minimum Regional. Artinya, gaji yang diterima pun tidak cukup untuk mengembalikan energi yang dipakai untuk bekerja dan untuk menghidupi keluarganya. Banyak contoh dari sebagian pekerja yang bekerja di berbagai usaha jasa pariwiasta di Bali bertahun-tahun bekerja pagi, siang, dan malam tidak juga sejahtera dan bahagia, justru semakin terpuruk karena semakin tergantung kehidupannya terhadap majikannya. Lalu, siapa yang lebih diuntungkan dari konsep pengembangan pariwisata yang menjauhkan diri dari usaha masyarakat lokal tersebut, bisa jadi karena ada kepentingan di balik semua itu.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul dari konsekuensi logis dampak kebijakan daerah tersebut apakah usaha jasa pariwisata yang berskala besar berkontribusi net terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang miskin bila dibandingkan dengan pengaruh usaha jasa pariwisata yang berskala kecil dan menengah. Padahal, strategi pengembangan pembangunan pariwisata berbasisi *Pro-Poor Tourism* (PPT) spesifik fokus pada dampak net menyejahterakan masyarakat miskin secara kolektif dan lebih mengutamakan memberikan kesempatan usaha-usaha kecil milik masyarakat lokal yang juga tidak anti kapitalis. Pendekatan pembangunan pariwisata PPT ini cenderung lebih mengikutsertakan partisipasi masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai pelaku, masyarakat menentukan sendiri arah pengembangan daerahnya, masyarakat merasa memiliki daerahnya, masyarakat tidak ketergantungan yang bisa dipermainkan oleh kapitalis besar, dan masyarakat lebih berkomitmen karena daerahnya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha informal ini sering identik dengan ketidakprofesionalan, kriminal, dan kemaksiatan yang sebenarnya tidak seperti itu. Asumsi seperti ini bisa jadi karena Pemerintah Daerah hanya mau lepas tanggung jawab tidak mau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka untuk bisa diberdayakan, dibandingkan ketika hanya mengurus usaha jasa yang berskala besar yang diduga lebih menguntungkan untuk orang-orang tertentu dari sisi pembagian komisinya yang jangka panjangnya kurang lebih bisa menyejahterakan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Padahal, pengembangan pembangunan pariwisata yang berbasis usaha-usaha masyarakat yang cenderung berawal dari kecil untuk menjadi besar efek kesejahteraannya lebih merata dan net berkontribusi terhadap masyarakatnya sendiri yang tidak gampang rapuh diterpa krisis moneter, sehingga bisa menekan rasio gini tersebut. Akhirnya, saran yang bisa diberikan dari tulisan ini kepada pemimpin daerah untuk tidak memoratoriumkan jenis usaha jasa pariwiasta berskala kecil dan menengah yang berbasis *pro-poor tourism* (PPT) yang justru net lebih berkontribusi kepada masyarakat miskin, meskipun usaha jasa pariwisata besar juga diperlukan oleh kawasan Banyuwangi dengan segmen pasarnya masing-masing untuk meramaikan pengembangan pembangunan pariwisata yang menyejahterakan masyarakat lokal terlebih dahulu dari pada pejabat dan pendatangnya serta berkelanjutan. (Dr. Bambang Suharto Dosen Pariwisata Universitas Negeri Gorontalo)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUWANGI

M E N G U C A P K A N

"Selamat Hari Ulang Tahun RI ke-71 Semoga NKRI Tetap Jaya"

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. Sulihtiyono, MM., M.Pd.

Seluruh Anggota MKKS
SMP Negeri se Banyuwangi

Mengucapkan "Selamat Hari Ulang Tahun RI ke-71 Semoga Indonesia Makmur dan Sejahtera"

SELURUH KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

M E N G U C A P K A N

Mengucapkan "Selamat Hari Ulang Tahun